

VISI DAN PARADIGMA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI): KUALITAS, INTEGRATIF, DAN KOMPETITIF

Rudi Ahmad Suryadi
STIS Nahdlatul 'Ulama Cianjur
rudiahmad83@gmail.com

ABSTRACT: *The implementation of Islamic Teaching (Pendidikan Agama Islam) relates with achieving the goal of faith, piety and best character based on the spirit of UU RI Nomor 20 of 2003 on National Education System. In achieving it's quality in the context of national development paradigm requires an understanding it. Paradigm is a foundation in quality development strategies. The paradigm that leads to the achievement of quality, integrated, and competitive be the foundation and frame for the realization of strategic programs with various dimensions. Paradigm of Quality, Integrative, Competitive in Religious Character frame becomes viewpoint for future. Expectations of education that touches the ease of access and quality can always be realized with a variety of synergistic efforts of various dimensions.*

Penyelenggaraan PAI berhubungan dengan pencapaian tujuan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia berdasarkan semangat UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pencapaian mutu PAI dalam konteks nasional memerlukan pemahaman mengenai paradigma pengembangan PAI. Paradigma ini menjadi landasan dalam pengembangan strategi pengembangan mutu PAI. Paradigma PAI yang mengarah pada pencapaian mutu, integratif, dan kompetitif menjadi landasan dan bingkai untuk perwujudan program-program strategis dengan berbagai dimensi PAI. Paradigma Kualitas, Integratif, Kompetitif dalam Bingkai Karakter Religius menjadi sudut pandang untuk PAI masa depan. Harapan pendidikan yang menyentuh kemudahan akses dan peningkatan mutu senantiasa dapat terwujud dengan berbagai upaya sinergis dari berbagai pihak.

Keyword: Vision, Paradigm, Strategic.

Pendahuluan

Perkembangan pendidikan, kemanusiaan, dan iptek menjadi salah satu isu penting yang terus diperbincangkan dalam konteks pendidikan nasional. Harapan menjadikan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berbudaya terus menjadi bahan pemikiran dalam benak pemerhati pendidikan. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran dan proses pembelajaran mempunyai posisi urgen dalam mewujudkan harapan tersebut. Dalam konteks filosofis, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh kandungan nilai-nilai pendidikan agama bersifat normatif. Menurutnya ada dua cara nilai-nilai karakter PAI menjadi operasional dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama*, nilai-nilai normatif itu diaktualisasikan langsung menjadi perilaku. Untuk jenis aktualisasi semacam ini telah dikembangkan melalui ilmu fikih. *Kedua*, mentransformasikan nilai-nilai normatif itu menjadi teori ilmu sebelum diaktualisasikan ke dalam perilaku.¹

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam merupakan bentuk penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini secara jelas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab II pasal 2 ayat (1) Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama (2) pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam pasal 5 ayat (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan

¹Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1997), Cet. II, hlm. 279. Lihat juga Azyumardi Azra, "Pembangunan Karakter Bangsa: Pendekatan Budaya, Pendidikan dan Agama", dalam Saifuddin dan Karim, *Refleksi Karakter Bangsa* (Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2008), Cet. I, hlm. 17.

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (5) pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

Pendidikan agama sebagai entitas proses pendidikan yang dijalankan di sekolah merupakan sebuah proses pembentukan transfer pengetahuan, internalisasi nilai religius, dan penghayatan nilai-nilai religiusitas sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah adalah: (1) menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; (2) mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Proses pendidikan khususnya mengenai Agama Islam di sekolah akan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan standar kompetensi yang diharapkan jika dikelola dengan baik. Mengingat pentingnya pengelolaan pendidikan agama di sekolah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Pada pasal 1 Permenag tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Visi PAI dalam Konteks Indonesia

Dalam hal makro, pendidikan dalam konteks Indonesia tak terkecuali dengan PAI, berkaitan erat dengan visi pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.²

²Lihat *Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019*, hlm. 57.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita.³ Berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya PAI, terdapat tiga point penting dalam Nawa Cita yang sangat bersentuhan dengan PAI, yaitu:

1. Nawa Cita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, lebih spesifik pada sub agenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019.
2. Nawa Cita ke 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.
3. Nawa Cita ke 9, yaitu memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Istilah karakter atau pendidikan karakter kembali menggaung setelah memperhatikan berbagai fenomena degradasi moral yang terjadi di Indonesia. Pendidikan dalam kaitan ini sangat bersentuhan dengan pembentukan nilai, moral, karakter, dan akhlak mulia warga negara.

Tujuan pendidikan nasional di atas merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan pendidikan karakter, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.⁴

³Nawa Cita yang dimaksud adalah: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestic; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Lihat Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019, hlm. 58.

⁴Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan:Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa)*, (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 2.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.⁵

Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.⁶

Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.⁷

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.⁸

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm. 3.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm. 4.

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁹

Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural. Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat.¹¹

Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta

⁹Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 1.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 2.

bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada: 1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; 3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 5) ancaman disintegrasi bangsa; dan 6) melemahnya kemandirian bangsa.¹²

Sentuhan PAI dalam konteks pembentukan karakter sangat kuat dan strategis. PAI yang berisikan nilai normatif dan sosiologis mendapat porsi yang kuat dalam pembangunan nasional. Kementerian agama sebagai salah satu instansi pemerintah, berdasarkan PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan karakter bangsa, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat PAI, di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah: Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.¹³

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama. Rukun didefinisikan terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.¹⁴

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

¹²*Ibid.*

¹³Lihat Renstra Kementerian Agama RI 2015-2019, hlm. 58.

¹⁴*Ibid.*

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.¹⁵

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.¹⁶

Pengembangan PAI dalam konteks di atas dijalankan oleh pandangan ke depan (visi) Ditjen Pendidikan Islam dan Direktorat PAI dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu *leading sector* yang menangani pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).¹⁷

Problematika Pendidikan Agama Islam (PAI)

Perkembangan PAI pada sekolah tidak semuanya dapat dikatakan berjalan lancar sesuai harapan. Pendidikan tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi. Masalah-masalah itu bisa berasal dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai, proses pendidikan, serta pengaruh-pengaruh lain yang bisa menimbulkan masalah pendidikan.

Pendidikan di Indonesia-dalam *pandangan sistem*- memiliki beberapa problema. Sistem pendidikan nasional sebagaimana yang diungkapkan oleh HAR. Tilaar mempunyai beberapa kelemahan.

Pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas segala bidang. *Kedua*, sistem pendidikan tidak pernah memperhatikan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih parah lagi masyarakat dianggap hanya sebagai objek pendidikan, masyarakat tidak pernah diperlukan sebagai subjek pendidikan. *Ketiga*, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik tersebut ditopang oleh sistem birokrasi yang kaku dan dijadikan alat kekuasaan. *Keempat*, terbelenggunya guru, guru dijadikan sebagai alat birokrasi. *Kelima*, pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian kognisi siswa. *Keenam*, siswa tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif, inovatif serta berorientasi pada rasa ingin tahu.¹⁸ Kelemahan-kelemahan di atas mengacu pada aspek pendidikan dalam perspektif sistem.

Berdasarkan masalah-masalah yang mendera pendidikan nasional maka perlu segera dievaluasi secara simultan berbagai kebijakan, baik mengenai kekuatan dan kelemahan, titik persoalan krusial dan implikasi, serta bagaimana jalan keluar terbaiknya. Masalah-masalah pendidikan tersebut bisa diidentifikasi ke dalam beberapa hal. *Pertama*, aspek birokrasi yang terkesan kurang memberikan keleluasaan yang memadai bagi peningkatan mutu

¹⁷Visi Ditjen Pendidikan Islam, yaitu *Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi*, Sementara visi Ditpai adalah *Terwujudnya lulusan sekolah yang beriman dan bertaqwa, taat beragama, inklusif, cerdas, berpikiran maju, dan berakhlak mulia*.

¹⁸HAR. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Indonesia Tera, 1999), hlm. 76.

pendidikan terutama lewat kebijakan tenaga kependidikan, kurikulum, dan pengembangan fasilitas. *Kedua*, aspek pemberdayaan SDM kependidikan pada semua tingkatan pendidikan. *Ketiga*, aspek pemberdayaan sistem pendidikan. *Keempat*, aspek manajemen pendidikan yang selama ini terasa kurang mampu merespons perubahan dan tuntutan zaman. *Keenam*, aspek kurikulum yang masih mengalami sedikit sentralisasi dan penyeragaman dan kurang mengadaptasi konteks kebutuhan masyarakat lokal maupun global, meskipun gaya perbaikan sekarang telah dilakukan tetapi masih terbatas.¹⁹

Terkait dengan PAI pada sekolah, selain masalah pembelajaran yang monoton, muncul pula masalah persepsi peningkatan mutu antara Kemenag dengan Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah. Tidak semua Dinas Pendidikan sepatutnya dalam memberlakukan pencapaian beban kerja guru PAI misalnya pada aspek ekuivalensi jam ekstrakurikuler. Kendala yang muncul, juga berhubungan dengan pengadaan buku guru dan buku siswa dan pemenuhan SNP pada sarana PAI yang belum optimal.

Dalam konteks pembelajaran misalnya, terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu: 1) Dari proses pembelajaran, guru PAI lebih terkonsentrasi persoalan-persoalan teoritis keilmuan yang bersifat kognitif semata dan lebih menekankan pada pekerjaan mengajar/transfer ilmu; 2) Metodologi pembelajaran PAI selama ini secara umum tidak kunjung berubah, ia bagaikan secara konvensional-tradisional dan monoton sehingga membosankan peserta didik; 3) Pelajaran PAI seringkali dilaksanakan di sekolah bersifat menyendiri, kurang terintegrasi dengan bidang studi yang lain, sehingga mata pelajaran yang diajarkan bersifat marjinal dan perifer; 4) Pembelajaran PAI seringkali terkonsentrasi dalam kelas dan enggan untuk dilakukan kegiatan praktek dan penelitian di luar kelas; 5) Penggunaan media pembelajaran baik yang dilakukan guru maupun peserta didik kurang kreatif, variatif dan menyenangkan.; 6) Pembelajaran PAI cenderung normatif, linier, tanpa ilustrasi konteks sosial budaya di mana lingkungan peserta didik tersebut berada, atau dapat dihubungkan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat perubahannya; dan 7) Kurang adanya komunikasi dan kerjasama dengan orangtua dalam menangani permasalahan yang dihadapi peserta didik.

¹⁹Ahmad Barizi dan Imam Tolkhah, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 70-71.

Isu radikalisme menjadi sorotan penting dalam lingkungan pendidikan. Hasil kajian sebelumnya tentang “Radikalisme Bernuansa Agama di sekolah” menemukan bahwa, siswa tidak menganggap pendidikan agama Islam di sekolah sebagai sumber yang efektif dan berpengaruh dibandingkan dengan sumber-sumber di luar kelas yang didapatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh Rohis atau pengajar dari luar dan alumni, dosen tamu, dan keikutsertaan dalam organisasi Islam. Meskipun begitu di sisi lain, siswa masih mengakui pendidikan agama Islam di sekolah sebagai sumber informasi agama yang utama. Bahkan dalam struktur pendidikan formal di sekolah, guru PAI menghadapi tantangan dari rekan kerja mereka, yaitu guru mata pelajaran lainnya yang notabene tidak dibatasi oleh kurikulum atau jam mengajar dalam memberikan pengajaran agama kepada siswa.²⁰

Selain itu, pendidikan agama Islam di sekolah dan gurunya merupakan faktor yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di sekolah. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI, berkewenangan menghadapi fenomena ini. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan langsung dapat dieksekusi dalam implementasi. Itulah sebabnya, walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya paham radikalisme di sekolah, terdapat prioritas upaya menangkal paham tersebut melalui kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama di sekolah, dengan memberikan pelatihan kepada guru agama Islam dalam memperluas materi pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya damai, termasuk nilai-nilai demokrasi, multikulturalisme, dan kemanusiaan, dan memberikan pelatihan kepada guru-gurunya dalam memperbaiki metodologi pembelajarannya.²¹

Begitu juga, perhatian PAI untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sekolah inklusi, dan SLB, belum mendapatkan perhatian serius. Sekolah baik sekolah reguler maupun SLB atau inklusi memiliki hak yang sama dalam memberikan layanan PAI bagi ABK. Dua karakter peserta didik, baik normal maupun ABK, dalam pandangan negara memiliki hak yang sama dalam menerima layanan pendidikan yang bermutu.

²⁰ACDP, *Panduan De-Radikalisme Bernuansa Agama Melalui Pelatihan Pengayaan Materi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Cardno, 2015), hlm. 7

²¹*Ibid.*, hlm. 1.

Perspektif Paradigmatik Pengembangan Mutu Pendidikan Agama Islam

Memahami PAI, tidak serta ia hanya berhubungan mata pelajaran. PAI memiliki varians internal yang cukup kompleks. Ia berhubungan dengan guru, pengawas, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, kompetensi lulusan, juga pemenuhan sarana prasarana yang mendukung. Dalam hal ini, PAI dinyatakan bermutu jika semua komponen menyatu dalam jalinan yang harmonis dan menunjukkan pencapaian mutu tertentu, yang dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pengertian mutu (kualitas) telah banyak didefinisikan orang sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang yang mendasarinya. Secara konvensional mutu biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi (*performance*), keadaan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy for use*), estetika (*esthetics*).²² Pengertian ini mulai ditinggalkan karena dalam dunia bisnis sudah tidak kompetitif, para manajer memerikan perhatian pada definisi yang lebih strategis. Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary) mutu didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan dispesifikasikan atau ditetapkan.²³ Dengan demikian mutu diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) atau konfirmasi terhadap kebutuhan (*conformance of the requirement*).²⁴

Berbicara mengenai kualitas, maka diperlukan beberapa perspektif yang dapat digunakan. Banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangannya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Performance to the standard expected by the customer*
2. *Meeting the customer's needs the first time and every time*
3. *Providing our customers with product and services that consistently meet their needs and expectations.*
4. *Doing the right thing right the first time, always striving for improvement, and always satisfying the customer.*
5. *A pragmatic sistem of continual improvement, a way to successfully organize man and machines.*

²²Vincent, *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 7.

²³Richard Chang, *Peningkatan Proses Berkesinambungan*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), hlm. 7.

²⁴Garvin David, *Managing Quality*, (New York USA: The Free Press, 1988), hlm. 4.

6. *The meaning of excellence.*
7. *The unyielding and continuing effort by everyone in an organization to understand, meet, and exceed the needs of its customers.*
8. *The best product that you can produce with the materials that you have to work with.*
9. *Not only satisfying customers, but delighting them, innovating, creating.*²⁵

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut:

1. kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
2. kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).²⁶

Dengan berdasarkan elemen-elemen tersebut, Goetsch dan Davis²⁷ membuat definisi mengenai kualitas yang lebih luas cakupannya. Definisi tersebut adalah: *kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.*

Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh beberapa komponen yang terkait, mulai dari *input* (masukan), proses, dan *output* (keluaran), serta dengan pengelolaan manajemen yang bagus pula. Rachman menyatakan bahwa manajemen peningkatan mutu pendidikan memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh lembaga pendidikan yang akan menerapkannya, yaitu; karakteristik dari sekolah efektif (*effective school*), dan manajemen peningkatan mutu pendidikan yang merupakan wadah atau kerangkanya. Oleh karena itu, karakteristik berikut memuat secara *inklusif* elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi *input*, proses, dan *output*.

1. *Input* adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. *Input* meliputi;

²⁵Zalian Yamit, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 17.

²⁶Soewarso, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 1999), hlm. 34.

²⁷Goetch and Davis, *Introduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness*, (Englewood Clift, Prentice-Hall International, 1994), hlm. 2.

- kebijakan mutu dan harapan, sumber daya (kesediaan masyarakat), berorientasi siswa, manajemen (pembagian tugas, perencanaan, kendali mutu, dan efisiensi).
2. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input* sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*.
 - a. Pembelajaran, berorientasi: *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*.
 - b. Kepemimpinan yang kuat atau demokratik: kemampuan manajerial, kemampuan memobilisasi, dan memiliki otonomi luas.
 - c. Lingkungan: aman, nyaman, dan manusiawi.
 - d. Pengelolaan tenaga efektif: perencanaan, pengembangan, penilaian, dan imbal jasa.
 - e. Memiliki budaya mutu (kerjasama, merasa memiliki, mau berubah, mau meningkatkan diri, dan terbuka).
 - f. Tim kerja (kompak, cerdas dan dinamis)
 - g. Partisipasi masyarakat tinggi.
 - h. Memiliki akuntabilitas: laporan prestasi, respon tanggapan masyarakat.
 3. *Output* dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam :
 - a. Prestasi Akademik: nilai UN, STTB, taraf serap, lomba karya ilmiah, dan lomba keagamaan.
 - b. Prestasi non akademik: olah raga, kepramukaan, kebersihan, toleransi, disiplin, kesenian, kerajinan, solidaritas, dan lain-lain.²⁸

Fattah menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu harus terlibat dari berbagai komponen, yaitu: *input*, kurikulum, sumberdaya manusia, sarana, biaya, dan metode yang bervariasi, serta penciptaan suasana belajar yang kondusif. Manajemen sekolah yang menjadi otoritas kepala sekolah, dan manajemen kelas yang menjadi otoritas guru berfungsi mensinkronkan berbagai *input* atau mensinergikan semua komponen dalam proses pembelajaran.²⁹ Berkenaan dengan manajemen peningkatan mutu, maka diperlukan kepala sekolah yang

²⁸Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi, dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 252-254.

²⁹Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), hlm. 85.

mau memberikan wewenang kepada para guru dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar, diberikan kesempatan dalam melakukan pembuatan keputusan, dan diberikan tanggungjawab yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai guru. Dengan adanya pelimpahan wewenang, inisiatif dan rasa tanggungjawab, guru dan staf sekolah lainnya dapat lebih terdorong untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan lebih baik yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Manajemen peningkatan mutu pendidikan mempersyaratkan integrasi dari berbagai faktor yang dapat diintegrasikan, yaitu: pelanggan (*klien*), kepemimpinan (*leadership*), tim (*team*), proses (*process*), dan struktur (*organization*).

1. Pelanggan atau *klien* adalah seseorang atau kelompok yang menerima produk atau jasa layanan. Pelanggan yang ada di dunia pendidikan berkaitan erat dengan pengguna pendidikan itu sendiri termasuk didalamnya adalah *stakeholders* pendidikan. Hal-hal yang perlu dipahami oleh pelanggan atau pengguna pendidikan adalah nilai-nilai organisasi, *visi* dan *misi* yang perlu dikomunikasikan, yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran.
2. Kepemimpinan (*leadership*) merupakan hal yang esensial dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan, sehingga diperlukan *visionary leadership* kepala sekolah. Dalam konteks manajemen peningkatan mutu, pemimpin harus mampu dalam menetapkan dan mengendalikan *visi* sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dalam konteks manajemen peningkatan mutu sekolah harus mempunyai *visi*, *kreativitas*, *sensitivitas*, pemberdayaan, dan memahami tentang manajemen perubahan.
3. Tim (*team*) merupakan sarana yang harus dibangun oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja, karena dalam manajemen peningkatan mutu lebih menekankan pada kejelasan tujuan dan hubungan *interpersonal* yang efektif sebagai dasar terjadinya kerja kelompok yang efektif.
4. Proses (*process*) kerja merupakan kunci yang harus disepakati dalam manajemen peningkatan mutu suatu sekolah/madrasah.
5. Struktur organisasi (*organization structure*) merupakan langkah kerja dalam pengorganisasian dan menentukan garis kewenangan dalam konteks manajemen peningkatan mutu sekolah.

Peningkatan mutu pembelajaran dalam pendidikan merupakan salah satu upaya yang sedang diprioritaskan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada proses kegiatan pembelajaran di masa lalu banyak yang berjalan secara searah. Dalam hal ini fungsi dan peranan guru menjadi amat dominan, guru sangat aktif tetapi sebaliknya siswa menjadi sangat pasif dan tidak kreatif dan kadang siswa juga dianggap sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga siswa kurang dapat dikembangkan potensinya.

Beberapa penjelasan mengenai mutu di atas jika dihubungkan dengan PAI, memunculkan sebuah asumsi bahwa PAI bermutu jika semua komponen yang ada di dalamnya dapat memenuhi bahkan melebihi harapan semua pihak. Dalam kaitan ini, jika dilihat dari pelaku pembelajaran, guru PAI harus dapat mengembangkan kualifikasi dan kompetensi sehingga dapat menampilkan diri menjadi pendidik yang berkualitas, yang dapat mendorong komponen lain dalam sinergi pemenuhan harapan.

Dalam pengembangan PAI dalam konteks nasional, diperlukan paradigma pengembangan mutu. Mutu menjadi konstelasi dan tujuan dalam proses pengembangan PAI di dalamnya, mulai dari tataran mikro (sekolah) hingga makro (negara).

Paradigma, secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, *paradigm* berarti *type of something, model, pattern* (bentuk sesuatu, model, pola).³⁰ Dalam bahasa Yunani, paradigma berasal dari kata *para* (di samping, di sebelah) dan kata *deknay* (memperlihatkan; model, contoh, arketipe, ideal).³¹ Plato, menggunakan kata *paradeigma* dalam *Republic*-nya dengan arti *a basic form encompassing your entire destiny*.³² Plato pun pernah mengemukakan bahwa paradigma merupakan *segala sesuatu yang diciptakan untuk sebuah sebab*. Dan mungkin sesuatu yang menjadi sebab itulah yang dimaksudkan Plato sebagai *paradeigma*.

Secara terminologis,³³ paradigma merupakan *a total view of a problem; a total outlook, not just a problem in isolation*. Paradigma adalah

³⁰Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. vii.

³¹Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia, 1996), hlm. 779.

³²Andreas Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajara-on Becoming Learner-Pemberdayaan Diri, Transformasi Organisasi dan Masyarakat Lewat Proses Pembelajaran*, (Jakarta : Kompas, 2000), hlm. 83.

³³Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam : Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 4.

cara pandang atau cara berpikir tentang sesuatu. Dalam *Kamus Filsafat*, terdapat beberapa pengertian paradigma, diantaranya sebagai berikut :

1. Cara memandang sesuatu ;
2. Dapat diartikan sebagai model, pola, ideal. Dari model-model ini berbagai fenomena dipandang dan dijelaskan ;
3. Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkrit. Hal ini melekat pada praktek ilmiah pada tahap tertentu ; dan
4. Dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset.³⁴

Paradigma, hemat Priatna dapat juga diilustrasikan sebagai kacamata. Paradigma adalah bingkai (*frame*) sebuah kacamata, sementara *sikap* adalah *lensa* kacamata tersebut. Kita melihat dunia di sekitar kita menggunakan keduanya. Dengan demikian, paradigma bukanlah sikap. Atau sebaliknya, sikap adalah lensa kacamata. Sikap ini terkurung dalam sebuah bingkai, yaitu paradigma. Berdasarkan paradigma itu yang membingkai sikap itulah kita bertindak dan berperilaku. Perilaku kita tidak bisa keluar dari kedua hal itu, karena kita melihat sesuatu dengan menggunakan *paradigma* dan *sikap*. Kita adalah bagaimana kita melihat diri kita.³⁵ Secara sederhana, paradigma pendidikan dapat dipahami sebagai cara pandang dan totalitas premis mengenai pendidikan.

Dalam kaitan ini, paradigma yang dikembangkan adalah *Kualitas, Integratif, Kompetitif dalam Bingkai Karakter Religius*. PAI yang berkualitas adalah harapan bersama warga negara (muslim) yang menjadi sisi kekuatan aspek demografis. Kualitas ini dapat dipengaruhi oleh sinergi antara guru PAI, pengawas PAI, kebijakan, sarana dan prasarana, serta kurikulum. Kelima aspek ini menjadi pendorong bagi pengembangan mutu PAI.

Pengembangan mutu PAI akan berjalan sinergis jika dilaksanakan dengan integratif. Dalam hal ini, integratif berarti keterpaduan lengkap, saling mengisi, memiliki kekuatan sinergitas antara sekolah dan masyarakat, perpaduan kurikulum lintas mata pelajaran berbasis kompetensi spiritual dan sosial religius, juga sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

PAI yang berisi tentang *content* agama dan muatan nilai religius selain menjadi bahan dasar kurikulum, juga merefleksi pada capaian bentuk perilaku. Perilaku keagamaan yang damai yang berada dalam

³⁴Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia, 1996), hlm. 779.

³⁵Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma...*, hlm. 6.

konteks ISRA (*Islam Rahmatan lil Alamin*). Keterpaduan antara perwujudan karakter religius dan perkembangan iptek secara optimal menghasilkan nuansa output yang kompetitif, bermutu dan memiliki daya saing tanpa tercerabut dari sosiokultural Islam Indonesia, sebagai model peradaban Islam di dunia.

Karakter religius sebagai harapan, proses, dan nilai yang diusung, akan menjelma dalam diri personal Indonesia, jika semua aspek yang berhubungan dengan PAI dapat berjalan beriringan, sinergi, dan saling menguatkan. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang sinkron, tidak berat sebelah, menempatkan diri dalam porsi yang seimbang, akan menjadi pendukung penguatan mutu PAI di sekolah.

Penguatan PAI berarti bahwa PAI telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan PAI sampai tahun 2015, yaitu sebagai berikut: a) Program beasiswa S2 dan S1, b) Shortcourse GPAI di Oxford dan Australia, c) Pengembangan Sarana Ibadah dan Sarana Pembelajaran, d) Visiting GPAI, e) Workshop K13 PAI, f) Workshop Pembelajaran ICT PAI, g) Pengembangan PAI Unggulan, h) Workshop Pembelajaran dan Penilaian, i) Pedoman Ekskul PAI ditandatangani oleh dua Kementerian, j) Modul ISRA, k) Modul Pengayaan PAI, dan l) Bantuan KKG, MGMP, dan Pokjawas. Pemberian beasiswa S1 Kualifikasi berjumlah 4.632 orang, dan beasiswa S2 untuk GPAI dengan jumlah 1.814 orang. Sertifikasi GPAI dan Pengawas PAI berjumlah 163.247 orang atau 87.95% dari 185.608 jumlah total. Dipai melaksanakan Bimtek Kurikulum 2013 pada 113.165 orang dari 185.608 orang.

Berbagai capaian tersebut, menjadi citra kemajuan PAI pada beberapa tahun ke belakang. Kemajuan ini harus terus dipupuk dan dikembangkan, dengan salah satu alternatif paradigma pengembangan PAI, yaitu *Kualitas, Integratif, Kompetitif dalam Bingkai Karakter Religius*.

Strategi Pengembangan Mutu PAI di Masa Depan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menyertai perhatian ahli pendidikan dalam memahami hubungan perkembangan iptek dengan teknologi. Globalisasi, rasionalisasi, dan hubungan transnasional turut menjadi salah satu ciri perkembangan kehidupan saat ini. Dampak perkembangan ini mendorong dunia pendidikan untuk memperhatikan bahwa indikator ini harus diantisipasi segera dalam konteks pendidikan dan pembelajaran.

Selain perkembangan ini, fenomena sosiologis yang mengitari masyarakat, terkadang menunjukkan stigma negatif. Perilaku sosial

yang tidak sepadan dengan norma menjadi fenomena dan fakta dalam ruang pembicaraan publik. Isu mengenai kenakalan remaja, tawuran, freesex, sampai radikalisme atas nama agama mencuat ke publik. Kejanggalan yang muncul adalah semuanya diarahkan pada PAI. PAI seolah menjadi korban akibat persepsi ini. Padahal permasalahan seperti ini bukan karena PAI, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain, dan perlu kerjasama antar semua pihak yang terkait.

Dalam bagian ini, terdapat beberapa isu strategis berhubungan dengan PAI:

1. Pencapaian tujuan iman dan takwa

Salah satu aspek tujuan dalam pendidikan Nasional adalah pencapaian iman dan takwa. Dua kata ini sangat bersentuhan dengan PAI. Iman dan takwa harus menjadi inti dalam pencapaian tujuan nasional, selain cerdas, kreatif, mandiri, dan aspek tujuan lainnya. Rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan yang *core*-nya iman dan takwa nampaknya belum terwujud. Kenapa bersikeras ingin mewujudkan iman dan takwa sebagai *core*? Karena pendidikan sekarang ini apalagi pendidikan perspektif Barat menyebabkan keresahan dan kekacauan. Pendidikan Barat tidak memandang iman dan takwa sebagai dimensi landasan pendidikan. Pendidikan Barat banyak berfokus pada pencapaian kecerdasan intelektual dan psikomotor. Aspek agama mereka abaikan. Mereka banyak yang cerdas dan menguasai teknologi dunia, namun hatinya kosong. Karena hatinya kosong maka perusakan dan dehumanisasi manusia terjadi karena ulah Barat. Karena tidak “iman” mereka menjadi resah dan membuat kekacauan. Oleh karena, aspek iman dan takwa ini menjadi penting, bahkan harus menjadi *core* pendidikan. Dalam pasal di atas, manusia yang beriman dan bertakwa, pernyataannya sejajar dengan aspek-aspek lain. Hal ini menandakan bahwa iman dan takwa belum menjadi sebuah *core* pendidikan nasional. Tapi tidak menjadi masalah besar kiranya, yang penting dalam tujuan pendidikan nasional ada pernyataan mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa.

2. Sebagian besar masyarakat muslim di negara ini belajar PAI.

Di Indonesia, terdapat sekolah dan madrasah. Pada sekolah, materi agama diajarkan pada mata pelajaran PAI, sementara di madrasah pada mata pelajaran fiqih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan al-Quran hadits. Pada sekolah, PAI

berisi semua konten materi agama. Berbeda dengan madrasah, konten agama dipisahkan menjadi beberapa mata pelajaran.

Jumlah sekolah di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) lebih banyak daripada madrasah (MI, MTs, MA). Data statistik pendidikan menunjukkan bahwa sampai tahun 2014, jumlah sekolah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sekolah di Indonesia tahun 2014

Sekolah Dasar	144228
SMP	28777
SMA	10765
SMK	7592
SLB	1686
Jumlah Total	193048

Dari jumlah total tersebut, 90% sekolah melaksanakan pembelajaran PAI, terkecuali pada lembaga-lembaga di bawah yayasan pendidikan non muslim. Dalam kaitan ini, PAI sudah menjadi “ikon” bagi seluruh peserta didik di Indonesia dengan berbagai perbedaan individual yang muncul. PAI sudah menjadi milik masyarakat Indonesia dalam konteks asumsi yang kuat dalam pembentukan religiusitas. Kebijakan mengenai PAI hendaknya tetap diperhatikan bahkan dikembangkan, karena ia sangat urgens dalam pembentukan karakter bangsa yang religius.

- Perhatian terhadap antiradikalisme dengan konsep ‘islam rahmatan lil alamin”.

Radikalisme yang mengatasnamakan agama menjadi perhatian PAI. Dalam kaitan ini, pembelajaran PAI dapat diarahkan pada upaya internalisasi akhlak mulia dalam mengantisipasi benih-benih radikalisme.

Inti dari Islam *Rahmatan lil’alamin* adalah aplikasi ajaran Islam yang bersinergi dengan tradisi masyarakat dimana Islam itu hadir. Kehadiran Islam di Indonesia juga memperkuat kondisi bangsa yang multikultural, toleran, humanis, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga kehadiran Islam mampu menciptakan suasana kehidupan harmonis baik sesama umat Islam, antara umat beragama, maupun antar masyarakat secara luas.³⁶ Dalam hal ini

³⁶Tim Penyusun, *Islam Rahmatan lil Alamin*, (Jakarta: Ditpai Kemenag RI, 2014), hlm. 1.

PAI dirancang untuk memberikan pemahaman kepada siswa sedemikian rupa sehingga muncul karakter yang mampu mendamaikan dunia sekitar.

Selain tiga hal di atas, terdapat potensi lain yang dapat mempengaruhi mutu PAI di masa depan, yaitu forum-forum wadah kerjasama dan sharing seperti MGMP dan KKG, dan Pokjawas; kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama; Sinkronisasi dan Kerjasama antar instansi; dan Perkembangan Teori Pembelajaran, Keadilan Pembelajaran, *Education for All*.

Berbagai potensi di atas mendorong pemerintah untuk senantiasa meningkatkan mutu PAI. Alternatif strategi yang dikembangkan di antaranya adalah:

1. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan
2. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
3. Memperkuat sistem penilaian pendidikan
4. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru dan Pengawas PAI
5. Meningkatkan kualitas PAI untuk memperkuat akhlak mulia dan budi pekerti luhur
6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru PAI dan Pengawas
7. Integrasi PAI dan Mapel lain dalam konteks pendidikan karakter
8. Membangun budaya sekolah yang kondusif dan religius
9. Optimalisasi PAI pada SLB, Inklusi, dan ABK

Sembilan strategi di atas, jika dilakukan secara sinergis akan menghasilkan pengembangan mutu yang lebih baik. Kebutuhan terhadap layanan PAI yang bermutu dapat menjadi titik fokus bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka pengembangan mutu PAI menuju lebih baik, berdasarkan masalah terdahulu dan kebutuhan untuk PAI masa depan, terdapat beberapa program prioritas, yaitu:

1. Networking Pengembangan PAI, baik antar instansi pemerintah, masyarakat, maupun dengan lembaga pengembangan mutu.
2. Sinkronisasi Pengelolaan PAI antara Kemenag, Kemendikbud, dan Kemendagri.

3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAI melalui Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (*PKB*), pemberian Beasiswa S2 bagi guru dan pengawas PAI, *shortcourse* model pembelajaran, dan *shortcourse* pendalaman ilmu keislaman.
4. Optimalisasi PAI pada ABK, SLB, dan sekolah Inklusi
5. Peningkatan mutu pembelajaran PAI khususnya yang berhubungan dengan pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan Pemantapan implementasi kurikulum PAI.
6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAI melalui pemenuhan sarana ibadah dan sumber pembelajaran PAI
7. Pemberdayaan FKG, KKG, MGMP, dan Pokjawas PAI.
8. Penguatan materi PAI melalui buku pengayaan;
9. Penguatan regulasi, pedoman, dan atau modul termasuk berhubungan dengan pembelajaran PAI pada SLB/Sekolah Inklusi;

Penutup

Penjelasan di atas memberikan konsep mengenai pengembangan mutu PAI untuk masa depan. Program dan kajian strategis mengenai mutu menjadi landasan dan bingkai untuk perwujudan program-program strategis dengan berbagai dimensi PAI. Paradigma Kualitas, Integratif, *Kompetitif dalam Bingkai Karakter Religius* menjadi sudut pandang untuk PAI masa depan. Harapan pendidikan yang menyentuh kemudahan akses dan peningkatan mutu senantiasa dapat terwujud dengan berbagai upaya sinergis dari berbagai pihak, tak terkecuali Direktorat PAI Kemenag RI sebagai ujung tombak kebijakan pengembangan mutu PAI di Indonesia.

Daftar Pustaka

- ACDP. *Panduan De-Radikalisme Bernuansa Agama Melalui Pelatihan Pengayaan Materi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Cardno.2015.
- Azyumardi Azra, “Pembangunan Karakter Bangsa: Pendekatan Budaya, Pendidikan dan Agama”, dalam Saifuddin dan Karim. *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia. 2008.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. *Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas.2010.

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa)*, Jakarta: Kemendiknas. 2010.
- Barizi, Ahmad dan Tolkhah, Imam. *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta : Rajawali Press. 2004.
- Chang, Richard. *Peningkatan Proses Berkesinambungan*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1999.
- David, Garvin. *Managing Quality*. New York USA: The Free Press. 1988.
- Goetch and Davis. *Introduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness*. Englewood Clift: Prentice-Hall International. 1994.
- Harefa, Andreas. *Menjadi Manusia Pembelajar-on Becoming Learner-Pemberdayaan Diri, Transformasi Organisasi dan Masyarakat Lewat Proses Pembelajaran*. Jakarta : Kompas, 2000.
- Ismail. *Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar. 2001.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan. 1997.
- Loren Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia. 1996.
- Nanang Fattah. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2003.
- Priatna, Tedi. *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam : Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019.
- Shaleh, Abdul Rachman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soewarso. *Total Quality Management*. Yogyakarta: ANDI Offset. 1999.
- Tilaar, HAR. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Indonesia Tera. 1999.
- Tim Penyusun. *Islam Rahmatan lil Alamin*. Jakarta: Ditpai Kemenag RI. 2014.

Vincent. *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta: Gramedia. 1997.

Yamit, Zalian. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.